



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN BANJARNEGARA

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN BANJARNEGARA
2012



	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan	5
1.3. Ruang Lingkup	6
1.4. Landasan Hukum	6
1.5. Pilar Strategis	7
1.6. Metode Penyusunan Rencana Strategis	8
TUGAS DAN FUNGSI DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	11
2.2. Sumber Daya Dinas Pendidikan	12
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	13
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Pendidikan	19
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	
3.1. Identifikasi Permasalahan Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	21
3.2. Telaah RPJMD	23
3.3. Penentuan Isu Strategis	30
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	
4.1. Visi dan Misi Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	34
4.2. Tujuan dan Sasaran	36
STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, PROGRAM DAN INDIKATOR	
5.1. Strategi	39
5.2. Arah Kebijakan	39
5.3. Program	40
5.4. Indikator Kinerja	41
PENUTUP	



Halaman

1. Tabel 2.1 : Indikator Mutu Pendidikan TK/RA/BA Tahun 2011/2012	16
2. Tabel 2.2 : Jumlah Sekolah, Murid, Guru dan Rasio Sekolah Terhadap Guru Tingkat SD/MI	17
3. Tabel 2.3 : Indikator Mutu Pendidikan Tingkat SD/MI	17
4. Tabel 4.1 : Indikator Kinerja Pendidikan Kab Banjarnegara Tahun 2012-2016 Ditinjau Aspek Kesejahteraan Masyarakat	41
5. Tabel 4.2 : Indikator Kinerja Daerah Kan Banjarnegara Tahun 2012-2016 Aspek Pelayanan Umum	41

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, hal ini sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 C ayat (1), Pasal 31 dan Pasal 32 UUD 1945 menjelaskan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Disamping itu, UUD 1945 juga mengamanatkan untuk dilakukannya peningkatan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia melalui sistem pendidikan nasional yang baik. Sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Maka dari itu, perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan.

Pendidikan juga merupakan hak paling mendasar bagi setiap insan sesuai dengan hak asasi manusia. Setiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama, dan gender. Akses dan peningkatan mutu pendidikan yang merata akan mendorong setiap warga negara Indonesia memiliki kompetensi yang baik sehingga mendorong tegaknya pembangunan manusia seutuhnya serta masyarakat madani dan modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sesuai dengan amanat UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Kabupaten Banjarnegara melaksanakan pembangunan pendidikan dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

(RPJMN) Tahun 2010-2014 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025, RPJPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2005-2025, RPJMD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011-2016 serta memperhatikan Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2010-2014 serta Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Panjang (RPPNJP) telah dijabarkan ke dalam empat tema pembangunan pendidikan, yaitu tema pembangunan I (2005-2009) dengan fokus pada peningkatan kapasitas dan modernisasi; tema pembangunan II (2010-2015) dengan fokus pada penguatan pelayanan; tema pembangunan III (2015-2020) dengan fokus pada penguatan daya saing regional; dan tema pembangunan IV (2020-2025) dengan fokus pada penguatan daya saing internasional. Tema pembangunan dan penetapan tahapan tersebut selanjutnya perlu disesuaikan dengan RPJPN 2005-2025 dan RPJMN 2010-2014 serta menyesuaikan dengan RPJMD Tahun 2011-2016 di Kabupaten Banjarnegara yang saat ini berada pada tahapan kedua (2009-2014) dan ketiga (2015-2020) pada RPJPD tahun 2005-2025. Pada tahapan kedua RPJPD, pembangunan Kabupaten Banjarnegara diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan dasar, peningkatan daya saing ekonomi rakyat, peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, serta peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya alam. Untuk mencapai daya saing ekonomi rakyat yang baik maka dibutuhkan kualitas sumberdaya manusia yang baik pula, hal ini dapat tercapai dengan cara menyelaraskan rencana pembangunan dan rencana pengembangan pendidikan. Sedangkan pada tahapan ketiga RPJPD, pembangunan Kabupaten Banjarnegara diarahkan pada pemantapan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang. Hasil ini terutama yang menekankan pada pencapaian daya saing wilayah dan masyarakat Banjarnegara yang berlandaskan pada keunggulan sumber daya manusia yang berkualitas, pelayanan dasar yang makin luas, infrastruktur wilayah yang makin berkualitas, dan kondusivitas wilayah yang makin mantap serta kemampuan ilmu dan teknologi yang makin

meningkat. Selaras dengan tujuan tahap kedua yang mengamanatkan adanya peningkatan kemampuan teknologi informasi yang baik maka diperlukan pula pengembangan pendidikan yang baik pula.

Renstra Pendidikan di Kabupaten Banjarnegara juga mengacu pada Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2010-2014 serta Renstra Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 dengan demikian akan terjadi sinkronisasi serta keberlanjutan program Pendidikan mulai dari Tingkat Nasional sampai Daerah. Renstra Pendidikan hendaknya juga harus dijadikan pedoman bagi semua tingkatan pengelola pendidikan di Kabupaten Banjarnegara dalam melaksanakan serta mengevaluasi program dan kegiatan pembangunan pendidikan.

A. Paradigma Pendidikan

Penyelenggaraan pendidikan didasarkan pada beberapa paradigma universal yang perlu diperhatikan sebagai berikut:

a. Pemberdayaan Manusia Seutuhnya

Memperlakukan peserta didik sebagai subjek merupakan penghargaan terhadap peserta didik sebagai manusia yang utuh. Peserta didik memiliki hak untuk mengaktualisasikan dirinya secara optimal dalam aspek kecerdasan intelektual, spiritual, sosial, dan kinestetik. Paradigma ini merupakan fondasi dari pendidikan yang menyiapkan peserta didik untuk berhasil sebagai pribadi yang mandiri (makhluk individu), sebagai elemen dari sistem sosial yang saling berinteraksi dan mendukung satu sama lain (makhluk sosial) dan sebagai pemimpin bagi terwujudnya kehidupan yang lebih baik di muka bumi (makhluk Tuhan).

b. Pembelajaran Sepanjang Hayat Berpusat pada Peserta Didik

Pembelajaran merupakan proses yang berlangsung seumur hidup, yaitu pembelajaran sejak lahir hingga akhir hayat yang diselenggarakan secara terbuka dan multimakna. Pembelajaran sepanjang hayat berlangsung secara terbuka melalui jalur formal, nonformal, dan informal yang dapat diakses oleh peserta didik setiap saat tidak

dibatasi oleh usia, tempat, dan waktu. Pembelajaran dengan system terbuka diselenggarakan dengan fleksibilitas pilihan dan waktu penyelesaian program lintas satuan dan jalur pendidikan (*multi entry-multi exit system*).

c. Pendidikan Untuk Semua

Pendidikan, minimal pada tingkat pendidikan dasar, adalah bagian dari hak asasi manusia dan hak setiap warga negara yang usaha pemenuhannya harus direncanakan dan dijalankan dengan sebaik mungkin. Pemenuhan atas hak untuk mendapatkan pembangunan dan sekaligus menjadi investasi sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendukung keberlangsungan pembangunan bangsa. Hak untuk mendapatkan pendidikan dasar sebagai pemenuhan hak asasi manusia telah menjadi komitmen global. Oleh karena itu, program pendidikan untuk semua yang inklusif diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal dengan sistem pendidikan terbuka dan berdomisili di tempat terpencil serta mereka yang mempunyai kendala ekonomi dan sosial.

Paradigma ini menjamin keberpihakan kepada peserta didik yang memiliki hambatan fisik ataupun mental, hambatan ekonomi dan sosial, ataupun kendala geografis, yaitu layanan pendidikan untuk menjangkau mereka yang tidak terjangkau. Keberpihakan diwujudkan dalam bentuk penyelenggaraan sekolah khusus, pendidikan layanan khusus, ataupun pendidikan nonformal dan informal, pendidikan dengan sistem guru kunjung, pendidikan jarak jauh, dan bentuk pendidikan khusus lain yang sejenis sehingga menjamin terselenggaranya pendidikan yang demokratis, merata, dan berkeadilan serta berkesetaraan gender.

d. Pendidikan Untuk Perkembangan, Pengembangan, dan/atau Pembangunan Berkelanjutan (PuP3B)

Pendidikan menghasilkan manusia berakhlak mulia menjadi rahmat bagi semesta alam. Manusia seperti itu memenuhi kebutuhannya

dengan memperhatikan kebutuhan generasi saat ini dan generasi-generasi yang akan datang (berkelanjutan intergenerasional). Paradigma ini mengajak manusia untuk berfikir tentang berkelanjutan planet bumi dan berkelanjutan keseluruhan alam semesta. Pendidikan harus menumbuhkan pemahaman tentang pentingnya berkelanjutan dan keseimbangan ekosistem, yaitu pemahaman bahwa manusia adalah bagian dari ekosistem. Pendidikan harus memberikan pemahaman tentang nilai-nilai tanggungjawab sosial dan natural untuk memberikan gambaran pada peserta didik bahwa mereka adalah bagian dari sistem sosial yang harus bersinergi dengan alam beserta seluruh isinya. Dengan nilai-nilai itu maka akan muncul pemahaman intervensi terhadap lingkungan, yang baik dan yang buruk, termasuk pembangunan.

1.2. Tujuan

Penyusunan Renstra Pendidikan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2013 - 2017 ini bertujuan untuk:

- (1) Sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat bidang pendidikan di Kabupaten Banjarnegara selama tahun 2013 – 2017.
- (2) Sebagai pedoman dalam mengevaluasi laporan akuntabilitas kinerja pendidikan di Kabupaten Banjarnegara.
- (3) Sebagai dasar dalam penyusunan rencana kerja (renja) tahunan Dinas Pendidikan Kabupaten Banjarnegara.
- (4) Sebagai dasar bagi masyarakat dan *stakeholder* untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan pendidikan di Kabupaten Banjarnegara.
- (5) Sebagai dasar bagi masyarakat dan *stakeholder* dalam melakukan pengawasan atas kinerja pendidikan di Kabupaten Banjarnegara.

1.3. Ruang Lingkup

Penyusunan Rencana strategis pendidikan Kabupaten Banjarnegara merupakan dokumen perencanaan pendidikan untuk periode 5 (lima) tahun, yakni tahun 2013 sampai dengan 2017, yang merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Banjarnegara 2011-2016.

1.4. Landasan Hukum

Landasan hukum Renstra Pendidikan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2013 – 2017 adalah sebagai berikut:

- (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- (3) Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- (4) Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- (5) Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- (6) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- (7) Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- (8) Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);

- (9) Undang-Undang No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
- (10) Undang-Undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- (11) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496)
- (12) Permendagri No. 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
- (13) Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2010-2014;
- (14) Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013;
- (15) Peraturan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Nomor 02 Tahun 2012 tentang RPJMD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011-2016.

1.5. Pilar Strategis

Pilar strategis landasan filosofis pendidikan di Kabupaten Banjarnegara mengacu pada strategi pembangunan pendidikan nasional sebagaimana ditetapkan dalam penjelasan umum UU Sisdiknas, yaitu sebagai berikut.

- (1) Pendidikan Agama serta Akhlak Mulia
- (2) Pengembangan dan Pelaksanaan Kurikulum Berbasis Kompetensi
- (3) Proses Pembelajaran yang Mendidik dan Dialogis
- (4) Evaluasi, Akreditasi dan Sertifikasi Pendidik yang Memberdayakan
- (5) Peningkatan Profesional Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- (6) Penyediaan Sarana Belajar yang Mendidik
- (7) Pembiayaan Pendidikan sesuai dengan Prinsip Pemerataan dan Berkeadilan
- (8) Penyelenggaraan Pendidikan yang Terbuka dan Merata
- (9) Pelaksanaan Wajib Belajar
- (10) Pelaksanaan Otonomi Satuan Pendidikan
- (11) Pemberdayaan Peran Masyarakat
- (12) Pusat Pembudayaan dan Pembangunan Masyarakat
- (13) Pelaksanaan Pengawasan dalam Sistem Pendidikan Nasional

1.6. Metode Penyusunan Rencana Strategis

a. Pengumpulan data

Data yang dikumpulkan adalah data sekunder yakni data yang diperoleh dari laporan internal Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Banjarnegara serta hasil Studi Pustaka yakni data yang diperoleh dengan mendasarkan kajian pada buku-buku aturan yang ada kaitannya dengan topik bahasan. Sedangkan data primer yakni data yang diperoleh dari mengadakan FGD.

b. Analisa Data

Analisa data dilaksanakan melalui analisa kualitatif dan kuantitatif.

c. Metode Penyusunan Rencana Strategis

Langkah-langkah penyusunan Renstra Pendidikan Kabupaten Banjarnegara dilakukan sebagai berikut:

Langkah I : Persiapan

Beberapa hal yang harus dipersiapkan dalam proses penyusunan Renstra adalah sebagai berikut:

- a. Identifikasi isu-isu strategis atau pilihan-pilihan strategis yang akan dihadapi dalam jangka waktu pelaksanaan Renstra;
- b. Identifikasi asas legal dalam pelaksanaan tugas dan justifikasi fungsi dan kewenangannya, selanjutnya bisa menjadi gambaran awal latar belakang perlunya Renstra Pendidikan terhadap kondisi umum yang dihadapi;
- c. Identifikasi struktur organisasi beserta tugas pokok dan fungsinya sebagai dasar untuk melihat dan menentukan lingkup kewenangan dan
- d. Identifikasi data-data dan informasi yang diperlukan sebagai bahan pengambilan keputusan selama proses penyusunan Renstra.

Langkah II : Identifikasi Kondisi Umum, serta Analisis Potensi dan Permasalahan

Identifikasi kondisi umum merupakan langkah untuk menggambarkan pencapaian-pencapaian yang telah dilaksanakan dalam Renstra periode sebelumnya serta aspirasi-aspirasi masyarakat terkait dengan pemenuhan kebutuhan barang publik, layanan publik, dan regulasi dalam lingkup kewenangan.

Langkah III : Penyusunan Visi dan Misi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan. Visi memberikan gambaran konsistensi kinerja selama 5 (lima) tahun mendatang serta gambaran menyeluruh mengenai peranan dan fungsi suatu organisasi. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Langkah IV : Penyusunan Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan dan sasaran strategis disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi pada langkah sebelumnya dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi. Pernyataan tujuan harus dilengkapi dengan sasaran strategis sebagai ukuran kinerjanya. Sasaran strategis dilengkapi dengan target kinerja sehingga menjadi ukuran keberhasilan dari pencapaian visi dan misi.

Langkah V : Penyusunan Arah Kebijakan dan Strategi

Strategi dan kebijakan disusun sebagai pendekatan dalam memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu (jangka menengah) serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran nasional serta sasaran strategis.

Langkah VI : Penyusunan Program dan Kegiatan

Program didefinisikan sebagai instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran.

Kegiatan didefinisikan sebagai bagian dari program yang dilaksanakan oleh satuan kerja yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya baik yang berupa personil (sumberdaya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, dan/atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Langkah VII : Penyusunan Target dan Pendanaan

Perencanaan kebutuhan pendanaan merupakan detail penjabaran strategi pendanaan program dan kegiatan yang dibiayai oleh APBD. Perencanaan kebutuhan pendanaan untuk Renstra yang disusun dalam perspektif jangka menengah. Perencanaan ini didasarkan pada kebijakan yang dilakukan dalam perspektif lebih dari satu tahun anggaran, dengan mempertimbangkan implikasi biaya keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya.

BAB II

TUGAS DAN FUNGSI DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 156 tahun 2009 pasal 2 ayat (1) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendidikan, pemuda dan olahraga yang menjadi kewenangan daerah. Dalam pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis dan program kerja bidang pendidikan, pemuda dan olahraga serta melaksanakan urusan kesekretariatan dinas,
- b. Pelaksanaa koordinasi intern dan antar unit verja terkait di bidang ketenagaan, pra sekolah dan sekolah dasar, sekolah menengah, pendidikan anak usia dini, pendidikan masyarakat, pemuda dan olahraga,
- c. Perumusan kebijakan dalam rangka pelaksanaan pemberian bimbingan, pembinaan dan pengawasan di bidang ketenagaan, pra sekolah dan sekolah dasar, sekolah menengah, pendidikan anak usia dini, pendidikan masyarakat, pemuda dan olahraga,
- d. Pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan atau usaha di bidang ketenagaan, pra sekolah dan sekolah dasar, sekolah menengah, pendidikan anak usia dini, pendidikan masyarakat, pemuda dan olahraga,
- e. Penelitian, pengembangan dan pengawasan di bidang ketenagaan, pra sekolah dan sekolah dasar, sekolah menengah, pendidikan anak usia dini, pendidikan masyarakat, pemuda dan olahraga,
- f. Pemberian rekomendasi perizinan di bidang ketenagaan, pra sekolah dan sekolah dasar, sekolah menengah, pendidikan anak usia dini, pendidikan masyarakat, pemuda dan olahraga,

- g. Pelaksanaan inventarisasi dan pendataannya serta pengidentifikasian di bidang ketenagaan, pra sekolah dan sekolah dasar, sekolah menengah, pendidikan anak usia dini, pendidikan masyarakat, pemuda dan olahraga,
- h. Penginventarisasian permasalahan ketenagaan, pra sekolah dan sekolah dasar, sekolah menengah, pendidikan anak usia dini, pendidikan masyarakat, pemuda dan olahraga,
- i. Pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan di bidang ketenagaan, pra sekolah dan sekolah dasar, sekolah menengah, pendidikan anak usia dini, pendidikan masyarakat, pemuda dan olahraga,
- j. Pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga kepada Bupati sebagai dasar pengambilam kebijakan lebih lanjut,
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga.

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga memimpin pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dan (2). Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara membawai :

- a. Sekretariat,
- b. Bidang Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar,
- c. Bidang Sekolah Menengah,
- d. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat, Pemuda dan Olah Raga,
- e. Bidang Ketenagaan dan Tenaga Kependidikan,
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas, dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

2.2. Sumber Daya Dinas Pendidikan

Sumber daya manusia Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara adalah sebanyak 7030 orang pegawai. Berdasarkan tingkat pendidikannya, terdiri dari : Tingkat pendidikan S2 dan S3 adalah

sebanyak 72 orang, S1 dan D-4 3490 orang tingkat pendidikan D3 dan SM sebanyak 163 orang; D-1 dan D-2 sebanyak 2130 orang, serta pendidikan menengah (SMA/SMK/ sederajat) 852 orang, SMP 245 orang dan SD 78 orang.

Berdasarkan Golongannya, Pegawai Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Banjarnegara, terdiri dari : golongan IV sebanyak 4166 Orang, Golongan III sebanyak 1871 orang, Golongan II sebanyak 932 orang, dan Golongan I sebanyak 65 orang..

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

a. Pendidikan

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Pendidikan meliputi pengajaran keahlian khusus, dan juga sesuatu yang tidak dapat dilihat tetapi lebih mendalam yaitu pemberian pengetahuan, pertimbangan dan kebijaksanaan. Salah satu dasar utama pendidikan adalah untuk mengajar kebudayaan melewati generasi.

Perencanaan dan perancangan pendidikan pada hakekatnya merupakan pemanfaatan dan pengelolaan pendidikan yang terpadu. Eksploitasi sumber daya manusia yang tidak memperhatikan kearifan lokal diduga akan menyebabkan krisis identitas. Pemanfaatan dan pengelolaan pendidikan melalui proses perencanaan dan perancangan memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terpadu.

Penerapan kearifan lokal (*local wisdom*) merupakan suatu upaya dalam rangka mewujudkan lingkungan pendidikan binaan yang harmoni dan sustainable melalui pemanfaatan pengetahuan lokal (*indigenous knowledge*), pendekatan kontekstual serta pendekatan partisipatif. Penggalan konsep/teori serta best practices tentang kearifan lokal atas

hasil rancangan masa lalu (*traditional setting, modern setting*) melalui design review maupun design practices sebagaimana merupakan suatu upaya dalam rangka “penyempurnaan” proses dan pendekatan perancangan pendidikan. Pemahaman atas potensi kearifan lokal dari stakeholder (akademisi, praktisi dan birokrat) menjadi penting dalam pemanfaatan penciptaan pola pendidikan binaan yang harmoni dan sustainable.

Pemerintah Kabupaten Banjarnegara melalui Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga berusaha untuk mewujudkan masyarakat yang berpendidikan dan berkarakter sebagai konsekuensi dari perkembangan dewasa ini yang menuntut adanya SDM yang berkualitas agar mampu berinteraksi dan bersaing secara mantap dalam peredaran kehidupan global yang tiada lagi batas-batas dinding kewilayahan. Dengan demikian diharapkan akan terwujud masyarakat yang berkualitas sehingga dapat menjadi subjek pembangunan yang handal demi kelangsungan dan keberhasilan pembangunan di segala bidang kehidupan.

Sejalan dengan itu adalah peran dan fungsi utama pemerintahlah untuk memberikan pelayanan pendidikan dan kesempatan kepada masyarakat dalam mengembangkan kreatifitas dan inovasinya sehingga semua potensi yang dimiliki masyarakat dapat didayagunakan untuk kesejahteraan masyarakat.

Kinerja pendidikan dasar dan menengah dimulai dengan kinerja dipandang dari pilar pendidikan, yaitu pemerataan dan perluasan akses pendidikan, dilanjutkan dengan peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan diakhiri dengan efisiensi internal pendidikan. Ketiga kinerja tersebut diterapkan pada setiap jenjang pendidikan, yaitu TK/RA/BA, tingkat SD, SMP, dan SM, sedangkan untuk relevansi hanya dilihat pada SMA dan SMK.

1. Pemerataan dan Perluasan Akses Pendidikan

Kinerja pemerataan pendidikan diukur d lima indikator pemerataan, yaitu :

- a) APK,
- b) AMK/AM,
- c) Rasio S/Sek,
- d) Rasio S/K, dan
- e) Rasio K/RK.

2. Peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan

Indikator mutu dapat dibedakan menjadi lima jenis indikator mutu, yaitu :

- a) mutu masukan,
- b) mutu proses,
- c) mutu SDM
- d) mutu fasilitas, dan
- e) biaya

3. Efisiensi internal masukan,

Indikator efisiensi internal pendidikan hanya diberlakukan untuk tingkat SD sampai dengan SM. Indikator tersebut meliputi :

- a) jumlah keluaran,
- b) jumlah tahun-siswa,
- c) jumlah putus sekolah,
- d) jumlah mengulang,
- e) lama belajar,
- f) tahun-siswa terbuang,
- g) rasio keluaran per masukan
- h) tahun masukan per lulusan,
- i) angka bertahan,
- j) koefisien efisiensi, dan
- k) angka bertahan tingkat 5 (khusus SD)

Sekolah Taman Kanak-kanak

Jumlah sekolah Taman Kanak-kanak di Kabupaten Banjarnegara sampai saat ini sebanyak 292 buah, terdiri dari 3 TK Negeri dan 289 TK Swasta. Jumlah guru TK di Kabupaten Banjarnegara sebanyak 690 orang sedangkan jumlah muridnya sebanyak 8367 orang dengan ratio guru dan murid adalah 1 : 13 (Kabupaten Banjarnegara Dalam Angka, 2011).

Dalam menentukan mutu pendidikan TK dan RA/BA, maka digunakan empat jenis indikator, seperti tercantum pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Indikator Mutu Pendidikan TK/RA/BA tahun 2011/2012

No	Indikator	TK	RA/BA	TK+RA/BA
1.	Angka lulusan	58,47	64,41	61,17
2.	Persentase Guru Layak	15,53	11,14	9,49
	a. Laki-laki	14,29	33,33	16,13
	b. Perempuan	15,58	10,99	9,39
3.	Persentase Ruang kelas			
	a. baik	71,26	56,80	63,99
	b. rusak ringan	6,29	10,65	8,48
	c. rusak berat	22,46	32,54	27,53
4.	Persentase fasilitas sekolah			
	a. Perpustakaan	4,11	3,86	3,99
	b. toilet	98,92	73,36	20,86

Sumber : Profil Pendidikan Kab. Banjarnegara tahun 2011/2012

Lulusan sekolah Taman Kanak-kanak biasanya melanjutkan ke Sekolah Dasar (SD) atau Ke Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang di sekitar tempat tinggalnya. Umum lulusan TK sudah cukup mampu dalam berinteraksi sosial, sehingga sudah siap menerima materi pengetahuan dasar yang dibutuhkan dalam menempuh pelajaran.

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan bahwa masih banyak gedung-gedung TK masih merupakan hasil swadaya masyarakat, dengan peralatan sekolah, permainan dan buku-buku penunjang yang belum memadai. Patut pula menjadi perhatian adalah guru TK, dimana kebanyakan dari mereka adalah guru honorer dengan kondisi mengajar

sama seperti guru bukan honorer bahkan mungkin lebih berat namun memiliki penghasilan yang masih rendah untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Kondisi ini sangat berpengaruh terhadap proses belajar mengajar, sehingga lulusannya pun kurang berkualitas.

Sekolah Dasar/Madrasah Ibtida'iyah (SD/MI)

Kabupaten Banjarnegara sampai saat ini memiliki 849 SD/MI baik negeri maupun swasta. Ketersediaan guru yang mengajar sebanyak 7342 orang yang terbagi 5456 orang untuk guru SD dan 1736 orang guru MI (Tabel 2.2). sedangkan indikator mutu pendidikan tingkat SD disajikan pada Tabel 2.3.

Tabel 2.2. Jumlah sekolah, murid, guru dan ratio sekolah terhadap guru tingkat SD/MI

Uraian	SD Negeri	SD Swasta	MI Negeri	MI Swasta	Jumlah
Jumlah sekolah	639	13	4	193	849
Jumlah Guru	5312	144	56	1680	2
Jumlah murid	83012	2382	814	16342	102550
Ratio thd sekolah :					
➤ Murid	130	183	204	85	121
➤ Guru	8	11	14	9	9

Tabel 2.3. Indikator Mutu Pendidikan Tingkat SD/MI tahun 2011/2012

No	Indikator	SD	MI	SD+MI
1.	Persentase lulusan TK/RA/BA	86,58	83,25	84,92
2.	Rata-rata UASBN	7,14	7,20	7,17
3.	Persentase Sekolah SBI	-	-	-
4.	Persentase Sekolah Terakreditasi	95,25	98,48	96,00
5.	Anagka mengulang	6,05	4,54	5,81
6.	Angka putus sekolah	0,28	0,36	0,29
7.	Angka lulusan	99,86	99,76	99,85
8.	Angka kelayakan mengajar	49,63	36,22	46,74
	a. Layak	49,63	36,22	46,74
	b. Tidak Layak	50,37	63,78	53,26
	c. Laki-laki	44,94	31,63	42,10

No	Indikator	SD	MI	SD+MI
	d. Perempuan	52,72	39,19	49,79
9.	Persentase Guru Terlatih	0,04	0,00	0,03
	a. Laki-laki	0,05	0,00	0,03
	b. Perempuan	0,03	0,11	0,04
10.	Persentase Guru Tersertifikasi	49,03	5,27	39,60
	a. Laki-laki	56,49	6,46	45,80
	b. Perempuan	44,12	4,50	35,53
11.	Persentase Kepsek Tersertifikasi	86,31	10,36	68,78
	a. Laki-laki	85,99	12,07	70,02
	b. Perempuan	86,94	7,79	66,56
12.	Persentase Kondisi Ruang kelas			
	a. baik	66,71	54,71	64,16
	b. rusak ringan	21,69	31,39	23,76
	c. rusak berat	11,60	13,90	12,09
13.	Persentase Fasilitas sekolah			
	a. Perpustakaan	37,12	20,71	33,29
	b. Lapangan olah raga	-	-	-
	c. Ruang UKS	3,89	20,20	4,51
	d. Tempat ibadah	1,44	19,19	1,77
	e. Toilet	335,89	64,66	200,38
14.	Angka Partisipasi Biaya (persen)			
	Pemerintah pusat	22,78	79,26	25,92
	Yayasan	0,03	0,10	0,03
	Orang Tua	1,62	1,12	1,59
	Pemerintah Provinsi	2,59	1,21	2,51
	Pemerintah Kabupaten	70,66	12,37	67,42
	Lainnya	2,33	5,94	2,67
15.	Satuan Biaya	2026618	576741	1736593

Sumber : Profil Pendidikan Kab. Banjarnegara tahun 2011/2012

Dari Tabel 2.2. terlihat bahwa masih terdapat 4.048 guru yang masih memiliki kualifikasi pendidikan di bawah S1 khususnya pada jenjang pendidikan dasar. Pemberian beasiswa studi lanjut guru S1 terus diupayakan tiap tahunnya dalam rangka pemenuhan standar kualifikasi guru terutama untuk guru jenjang pendidikan dasar.

Dari segi manajemen, sekolah sudah melaksanakan manajemen Berbasis Sekolah dengan bekerjasama dengan Komite Sekolah, namun demikian dari segi. Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah

(MPMBS) pelaksanaannya masih belum optimal dan belum menunjukkan hasil yang signifikan.

b. Pemuda dan Olah Raga

Organisasi pemuda yang tercatat di Kabupaten Banjarnegara ada sebanyak 24 organisasi, sedangkan untuk organisasi olahraga sendiri ada 27 organisasi. Sedangkan dalam pencapaian prestasi bidang olahraga, target yang diinginkan adalah mencapai prestasi 4 (empat) besar provinsi Jawa Tengah, dan semakin memasyarakatnya olahraga sebagai kebutuhan untuk menunjang kesehatan jasmani maupun rohani masyarakat pada umumnya sebagai sarana menciptakan masyarakat sehat yang berdaya guna dan mampu memiliki sikap dan sifat sportif, jujur dan adil.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Pendidikan

Pendidikan adalah suatu aktifitas yang tidak dapat berdiri sendiri, ada berbagai macam segi dan aspek kehidupan dalam masyarakat yang berkait dengan pendidikan itu sendiri. Untuk memahami bagaimana pendidikan tersebut maka haruslah pula dipahami macam segi dan aspek kehidupan yang terkait tersebut, yang secara garis besar segi dan aspek umum dapat dijabarkan adalah sebagai berikut :

1. Tingkatan sosial dan ekonomi masyarakat yang belum merata dan setara sehingga tidak semua masyarakat/penduduk dalam usia sekolah yang mendapat pendidikan secara formal.
2. Pola pikir masyarakat secara umum yang masih memandang sekolah menghabiskan uang, sehingga bagi masyarakat yang kurang mampu akan lebih memilih untuk bekerja ketimbang bersekolah.
3. Sumber daya manusia yang belum kompeten dan kompetitif untuk dalam globalisasi karena tidak mempersiapkan kemampuan dan kelebihan diri.
4. Kualitas dan kuantitas pendidikan yang masih belum mampu untuk ikut bersaing dalam era persaingan globalisasi.

5. Tumbuhnya berbagai lembaga/institusi pendidikan baik jalur formal maupun nonformal yang mempermudah dalam memberikan layanan pendidikan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat itu sendiri.
6. Kemudahan dan ketersediaan layanan system teknologi informasi baik yang ada di lembaga-lembaga pendidikan, tempat-tempat hiburan maupun warnet dalam rangka mendukung pendidikan dalam era globalisasi.
7. Terbatasnya penggunaan system teknologi informasi dalam mekanisme belajar mengajar di sekolah-sekolah meski layanan system teknologi informasi ini tersedia dan dapat diperoleh dengan mudah.
8. Peran serta dan perhatian masyarakat akan peningkatan mutu pendidikan yang belum optimal, meskipun masyarakat bersikap semakin kritis terhadap penyelenggaraan pendidikan.
9. Dinamika dan semangat insan pendidikan yang secara umum masih belum optimal dalam menunjukkan kemampuan dan prestasi keilmuannya.
10. Masih rendahnya minat masyarakat secara umum untuk membaca, menulis dan meneliti, terlebih lagi untuk membentuk komunitas pembelajaran yang peduli pendidikan yang bermutu dan berprestasi, Life Long Learning Community.

BAB III

ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

Berdasarkan hasil evaluasi dan capaian kegiatan maka permasalahan yang dihadapi Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga Kabupaten Banjarnegara adalah sebagai berikut:

a. Bidang Pendidikan

1) Sarana dan prasarana :

- a) Kondisi gedung sekolah dan rumah dinas guru/penjaga masih banyak yang rusak,
- b) Masih kurangnya sarana prasarana peningkatan mutu sekolah: gedung perpustakaan, gedung laboratorium, peralatan laboratorium/ praktikum, alat peraga dan sarana penunjang yang lain,
- c) Kondisi meubelair di sekolah banyak yang rusak,
- d) Terbatasnya anggaran pembangunan gedung

2) Penyelenggaraan pendidikan

- a) Masih adanya anak-anak usia sekolah yang Belum sekolah atau tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi terutama SMP dan SMA/SMK
- b) Masih banyak sekolah penerima dana Bantuan Operasional Siswa (BOS) yang belum atau kurang memahami tentang pengelolaan dana BOS sesuai dengan pedoman yang berlaku
- c) Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) di satuan pendidikan Belum optimal sebagaimana yang diharapkan
- d) Tim Pengembang Kurikulum Kabupaten (TPK) yang terbentuk tidak berjalan sesuai tugas yang tertuang dalam SK Pembentukan Tim Pengembang Kurikulum Kabupaten
- e) Tidak semua siswa miskin menerima Beasiswa Siswa Miskin (BSM) karena terbatasnya kuota

- 3) Pendidikan dan tenaga kependidikan
 - a) Proses pembelajaran sebagai wujud pengembangan kurikulum kurang optimal sebagai akibat distribusi guru mata pelajaran di sebagian besar satuan pendidikan kurang proporsional dengan kebutuhan yang semestinya
 - b) Masih banyak guru yang belum memenuhi standar kualifikasi minimal, terutama SD/MI
 - c) Masih sedikitnya guru yang lupus sertifikasi berakibat pada kesenjangan kesejahteraan guru dan kinerja guru
 - d) Tidak adanya tenaga administrasi di SD/MI berakibat guru yang disibukkan dengan kegiatan administrasi keuangan dana BOS atau bantuan lainnya

b. Bidang Pemuda dan Olah Raga

- 1) Belum berfungsinya beberapa kepengurusan cabang olah raga sehingga menghambat program pembinaan dan pembibitan atlet yang potensial
- 2) Minimnya sarana dan prasarana olah raga dengan klasifikasi standar baku baik secara nasional maupun internasional
- 3) Kurangnya pembinaan generasi muda pada hal-hal yang mengarah kepada kegiatan bekal masa depan agar mereka dapat hidup mandiri

Disamping permasalahan tersebut di atas, masalah lain yang muncul, adalah masalah kelembagaan, antara lain:

- a. Keterbatasan wewenang dan urusan dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan olah Raga yang secara umum masih berperan sebagai fasilitator maupun regulator
- b. Pengkoordinasian serta pensinkronisasian program kegiatan Dinas Pendidikan, Pemuda dan olah Raga yang belum optimal

- c. Pemanfaatan sistem teknologi informasi yang masih belum optimal di bidang pendidikan baik dari segi teknologi peralatan hardware dan software yang digunakan maupun sumber daya manusia

3.2. Telaah RPJMD

A. Bidang Pendidikan

Penyusunan Rencana strategis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga tidak terlepas dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), terutama visi, misi, dan tujuan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara. Visi tersebut adalah Terwujudnya Banjarnegara yang Mandiri dan Berdaya Saing, Menuju Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia.

RPJMD Kabupaten Banjarnegara menyebutkan bahwa salah satu tujuan dalam mengemban misi yang kelima (Mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan prioritas penegakan hukum, penghargaan hak asasi manusia, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak), yaitu Mewujudkan pendidikan bermutu dan terjangkau. Sedangkan sasarannya adalah :

- a. Meningkatnya perluasan akses pendidikan dan partisipasi masyarakat,
- b. Tersedianya akses infrastruktur pendidikan,
- c. Meningkatnya kualitas tenaga kependidikan,
- d. Meningkatnya mutu pendidikan, dan
- e. Meningkatnya minat baca masyarakat

Pendidikan termasuk fokus layanan wajib yang memegang peranan strategis dalam kelanjutan proses pembangunan. Melalui pendidikan, diharapkan akan tercipta manusia dengan karakter dan kemampuan yang unggul. Pembangunan pendidikan seperti yang tertuang dalam rencana strategis Kementerian Pendidikan Nasional memiliki 5 (lima) aspek, yaitu ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan, dan keterjaminan.

Selain berdasarkan Renstra Kemendiknas, dalam bidang pendidikan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian yang dilakukan didasarkan pada 3 (tiga) pilar pembangunan pendidikan, yaitu:

- a. Upaya pemerataan dan perluasan akses pendidikan;
- b. Peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing keluaran pendidikan; dan
- c. Peningkatan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik pengelolaan pendidikan.

3.2.1. Pendidikan Dasar

1) Angka Partisipasi Sekolah

Angka partisipasi sekolah merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Secara sederhana APS adalah jumlah murid usia pendidikan tertentu yang masih menempuh jenjang pendidikan tertentu per 1.000 orang jumlah penduduk usia pendidikan tertentu tersebut. Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 7-12 tahun mengalami peningkatan dari 95,49% pada tahun 2007 menjadi 96,95% pada tahun 2011. Sedangkan, APS usia 13-15 tahun mengalami penurunan dari 81,77% pada tahun 2007 menjadi 80,57% pada tahun 2011

2) Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap Penduduk Usia Sekolah

Rasio ini menggambarkan tingkat ketersediaan sekolah per jumlah penduduk usia sekolah. Capaian ketersediaan sekolah dengan penduduk usia sekolah mengalami peningkatan setiap tahunnya seiring dengan meningkatnya jumlah sekolah. Pada jenjang SD/MI meningkat dari 79,42% pada tahun 2007 menjadi 80,37% pada tahun 2011. Begitu juga pada jenjang SMP/MTs meningkat dari 23,41% pada tahun 2007 menjadi 27,95% pada tahun 2011

3) Rasio Guru terhadap Murid

Rasio ini menggambarkan tingkat perbandingan guru terhadap murid. Rasio guru dan murid pada jenjang pendidikan dasar selama tahun 2007-2011 sudah sesuai dengan Standar Pelayanan

Minimal (SPM) pendidikan dasar yang mensyaratkan rasio guru dan murid sebesar 1:32

3.2.2. Pendidikan Menengah

1) Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah pendidikan menengah (usia 16-18 tahun) mengalami peningkatan dari 38,54% pada tahun 2007 menjadi 44,66% pada tahun 2011

2) Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap Penduduk Usia Sekolah

Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pada jenjang SMA/MA/SMK meningkat dari 9,52% (42 unit sekolah) pada tahun 2007 menjadi 10,24% (46 unit sekolah) pada tahun 2011

3) Rasio Guru terhadap Murid

Pencapaian rasio guru dan murid pada jenjang SMA/SMK/MA pada tahun 2011 adalah sebesar 1:16. Jumlah ini menunjukkan tren menurun sejak tahun 2007

3.2.3. Fasilitas Pendidikan

Capaian pembangunan fasilitas pendidikan dipresentasikan dengan besaran ruang kelas dalam kondisi baik. Ruang kelas yang kondisinya baik pada jenjang SD di tahun 2011 mencapai 66,71% atau terdapat 33,29% ruang kelas masih dalam kondisi rusak ringan/berat (1.375 ruang kelas). Pada jenjang SMP mencapai 80,75% atau terdapat 19,25% ruang kelas dalam kondisi rusak ringan/berat (196 ruang kelas). Pada jenjang SMA/SMK 91,56% ruang kelas dalam kondisi baik, atau masih ada 8,44% ruang kelas dalam kondisi rusak ringan/berat (45 ruang kelas).

3.2.4. Pendidikan anak usia dini

Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) mengalami peningkatan dari 49,07% pada tahun 2007 menjadi 60,68% pada tahun 2011, belum mencapai target provinsi

sebesar 65,00% tetapi sudah melampaui target nasional sebesar 56,70%.

3.2.5. Angka Putus Sekolah

Angka Putus Sekolah pada tahun 2011 pada jenjang SD/MI mencapai 0,29% (313 siswa), SMP/MTs mencapai 0,99% (397 siswa), sedangkan pada jenjang SMA/MA/SMK mencapai 1,19% (254 siswa). Masih tingginya angka putus sekolah khususnya pada jenjang SMA/MA/SMK diantaranya karena faktor ekonomi keluarga. Sedangkan pada jenjang SD/MI dan SMP/MTs beberapa faktor yang mempengaruhi diantaranya adalah kurangnya kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan bagi anak dan faktor ekonomi.

3.2.6. Angka Kelulusan

a. Angka Kelulusan

Angka kelulusan jenjang SD/MI mengalami peningkatan dari 96,84% (17.636 dari 18.212 siswa) pada tahun 2007 menjadi 99,85% (15.678 dari 15.702 siswa) pada tahun 2011. Begitu juga dengan jenjang SMP/MTs meningkat dari 84,43% (8.708 dari 10.314 siswa) menjadi 96,44% (11.729 dari 12.162 siswa), dan pada jenjang SMA/MA/SMK angka kelulusan mengalami peningkatan dari 95,59% (4.685 dari 4.901 siswa) menjadi 99,93% (6.129 dari 6.133 siswa).

b. Angka Melanjutkan

Angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs mengalami peningkatan dari 80,09% (14.125 dari 17.636 siswa) pada tahun 2007 menjadi 87,98% (13.794 dari 15.678 siswa) pada tahun 2011. Sedangkan angka melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/MA/SMK mengalami penurunan dari 72,57% (6.319 dari 8.708 siswa) pada tahun 2007 menjadi 69,06% (8.100 dari 11.729 siswa) pada tahun 2011. Beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaian angka melanjutkan adalah masih

kurangnya kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan bagi anak, faktor ekonomi keluarga, dan belum meratanya akses pendidikan khususnya pada jenjang SMA/MA/SMK, dimana pendirian sekolah hanya terpusat pada beberapa kecamatan saja

3.2.7. Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/DIV

Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D4 pada jenjang SD mencapai 49,63% (2.708 guru dari 5.456 guru) pada tahun 2011, pada jenjang SMP mencapai 90,55% (1.810 guru dari 1.999 guru), dan pada jenjang SMA mencapai 96,64% (460 guru dari 476 guru). Pada jenjang SMK guru yang memiliki kualifikasi S1/D4 mencapai 95,60% (630 guru dari 659 guru).

B. Bidang Pemuda dan Olah Raga

Pembangunan kepemudaan memegang peranan strategis, karena pembangunan kepemudaan merupakan kaderisasi bagi pelaku pembangunan di masa depan. Pembinaan terhadap organisasi kepemudaan dilakukan agar organisasi kepemudaan sebagai kantong pengkaderan pemuda dapat memberi sumbangan yang positif terhadap proses pembangunan.

Pada tahun 2010 terdapat 24 organisasi kepemudaan, 27 organisasi olahraga, 16 klub olahraga, 4 gedung olahraga, 46 lapangan olahraga, 7 kegiatan kepemudaan, dan 5 kegiatan olahraga. Prestasi yang diperoleh di bidang kepemudaan dan olahraga diantaranya meningkatnya peringkat Kabupaten Banjarnegara dalam Pekan Olahraga Provinsi (POPDA SMP/MTs) dari peringkat ke-5 menjadi peringkat ke-3 dengan perolehan 11 medali emas, 4 perak, dan 4 perunggu. Pada POPDA untuk tingkat SMA/SMK/MA, Kabupaten Banjarnegara juga mengalami perbaikan peringkat dari posisi ke-9 ke posisi 6 dengan perolehan 6 emas, 3 perak, dan 2 perunggu.

Capaian pembangunan urusan kepemudaan dan olahraga relatif stagnan, dengan fokus pada pemeliharaan fasilitas. Jumlah fasilitas dan kegiatan olahraga jumlahnya tetap selama tiga tahun terakhir.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan syarat utama keberhasilan pembangunan daerah. Peningkatan kualitas sumber daya manusia tersebut diupayakan dengan peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, peningkatan layanan sosial, peningkatan kualitas kehidupan perempuan dan perlindungan anak, peningkatan kualitas pelayanan Keluarga Berencana, peningkatan kualitas ketenagakerjaan serta peningkatan kesadaran dan tertib hukum masyarakat

Upaya peningkatan pelayanan pendidikan dimaksudkan guna memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu untuk seluruh masyarakat yang meliputi infrastruktur dan fasilitas pendidikan, tenaga kependidikan yang berkualitas serta ketersediaan perpustakaan yang memadai.

Pembangunan di bidang keolahragaan tercermin dalam misi yang keenam (Mewujudkan pembangunan karakter bangsa melalui pengembangan seni budaya , penghargaan tradisi dan kearifan lokal), terutama tujuan yang pertama yaitu meningkatkan prestasi pemuda dan olah raga baik nasional maupun internasional, dengan sasaran :

- a. Meningkatnya peran aktif pemuda dalam pembangunan dan
- b. Meningkatnya pencapaian prestasi olahraga

Generasi muda sebagai tulang punggung bangsa dan negara memiliki posisi strategis sebagai kader penerus pemimpin bangsa dan pelaku pembangunan masa depan. Untuk itu pemuda harus disiapkan dan diberdayakan agar memiliki kualitas dan daya saing guna menghadapi tuntutan, kebutuhan dan tantangan di era globalisasi.

Dalam era globalisasi ini kita dihadapkan suatu masalah yang serius dimana generasi muda menganggap budaya asing lebih praktis dan unggul dibanding budaya sendiri yang kuno dan tradisional. Hal ini

merupakan suatu ancaman dan tantangan yang berat untuk mempertahankan nilai-nilai seni budaya dan tradisi. Fakta terjadi di tengah masyarakat yang semakin mengglobal adalah lunturnya nilai moral, krisis jati diri dan kepribadian serta kurang menghargai adat istiadat dan tradisi. Untuk menangkal ancaman tersebut perlu menempatkan kebudayaan dalam posisi strategis dalam membangun bangsa. Untuk itu diperlukan langkah yang nyata dalam rangka pengembangan seni budaya sendiri di tengah arus globalisasi dengan mewujudkan pengembangan karakter pemuda yang mandiri, cakap, dan berjiwa kewirausahaan, peningkatan budaya dan prestasi olahraga serta penguatan jati diri dan karakter daerah yang berbasis pada nilai budaya dan tradisi serta kearifan lokal.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011-2016 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah selama lima tahun mendatang, yang dalam penyusunannya mengacu pada RPJMN Tahun 2010-2014 dan RPJPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2005-2025. RPJMD ini sekaligus merupakan pedoman, landasan dan rujukan dalam penyusunan Renstra-SKPD, yang selanjutnya pada setiap tahun dalam kurun waktu 2011-2016 akan dijabarkan menjadi RKPD Kabupaten Banjarnegara

Pedoman transisi yang disusun secara terpadu dalam RPJMD 2011-2016 ini dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan pembangunan daerah dan mengisi kekosongan dokumen perencanaan pembangunan daerah, khususnya untuk tahun anggaran 2017. Program pembangunan daerah tahun transisi (2017) perlu disusun untuk membantu Bupati/Wakil Bupati terpilih hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) masa jabatan periode 2016-2021, khususnya perencanaan tahunan pada tahun 2017, baik RKPD maupun APBD Tahun 2017.

RPJMD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011-2016 yang telah disusun ini hendaknya dapat dilaksanakan oleh segenap pemangku kepentingan, terutama unsur pemerintah maupun unsur non pemerintah,

secara konsisten, jujur, transparan, partisipatif, dan penuh tanggung jawab. Oleh karena itu, perlu kiranya untuk merumuskan beberapa kaidah terkait dengan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011-2016 dalam langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) berkewajiban untuk melaksanakan program-program RPJMD dengan sebaik-baiknya.
2. Seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, berkewajiban untuk menyusun Renstra-SKPD dengan berpedoman pada RPJMD yang nantinya akan menjadi pedoman dalam menyusun Renja-SKPD.
3. Seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara berkewajiban menjamin konsistensi antara dokumen perencanaan Pusat, Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Banjarnegara, dan Sektoral. RPJMN Tahun 2010-2014 dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD, Bappeda Kabupaten Banjarnegara berkewajiban untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penjabaran RPJMD kedalam RKPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 sampai tahun 2016, baik dalam mekanisme evaluasi tahunan maupun lima tahunan.
5. Substansi RPJMD digunakan sebagai dasar evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, baik untuk evaluasi akhir tahun anggaran (1 tahun) maupun evaluasi akhir masa jabatan Kepala Daerah (lima tahun).

3.3. Penentuan Isu Strategis

Identifikasi berbagai faktor secara sistematis dalam merumuskan strategi kebijakan pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga di Kabupaten

Banjarnegara, digunakan model analisis situasi SWOT (strength, weaknesses, opportunities, and threat).

1. Faktor Internal

a) Kekuatan (strength)

- 1) Tugas dan fungsi pokok dari Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga yang jelas, tegas dan pasti dalam memberikan arahan pelaksanaan tugas maupun pekerjaan.
- 2) Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan yang berlangsung secara berkesinambungan untuk menjaga kualitas dan kuantitas pendidik dan tenaga kependidikan
- 3) Sistem Teknologi Informasi yang sudah tersedia dan sesuai dengan kebutuhan kemajuan jaman dan teknologi.
- 4) Koordinasi dan kerjasama yang baik sesuai dengan wewenang dan urusan masing-masing antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten Banjarnegara.

b) Kelemahan (weaknesses)

- 1) Belum adanya standar baku penilaian kinerja aparat dinas dan pengelola pendidikan.
- 2) Keterbatasan wewenang dan urusan dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan olah Raga yang secara umum masih berperan sebagai fasilitator maupun regulator.
- 3) Pemanfaatan sistem teknologi informasi yang masih belum optimal di bidang pendidikan baik dari segi teknologi peralatan hardware dan software yang digunakan maupun sumber daya manusia.
- 4) Pengkoordinasian serta pensinkronisian program kegiatan Dinas Pendidikan, Pemuda dan olah Raga yang belum optimal.
- 5) Sarana olah raga yang kurang memadai

2. Faktor Eksternal

a) Peluang (opportunities)

- 1) Pola hidup bermasyarakat yang masih memegang teguh aturan dan budaya setempat, dimana tenggang rasa dan gotong royong masih ada dalam lingkungan masyarakat.
 - 2) Terbentuknya lembaga pendukung pendidikan yaitu Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan.
 - 3) Kemudahan dalam memperoleh sarana prasarana untuk mengakses sistem teknologi informasi, baik dalam lingkungan sekolah, maupun masyarakat.
 - 4) Potensi Sumber Daya Manusia pemuda dalam pembangunan.
 - 5) Berkembangnya industri barang dan jasa memberikan peluang peningkatan kemandirian ekonomi pemuda.
 - 6) Banyaknya Penyelenggaraan event olahraga di Kabupaten Banjarnegara yang memberi peluang untuk membudayakan olahraga dan penambahan ruang publik untuk olahraga.
- b) Ancaman (threat)
- 1) SDM yang dikhawatirkan belum siap menghadapi globalisasi dan kekhawatiran mengenai ketidaksiapan masyarakat pendidikan dalam menghadapi arus globalisasi dengan segala pengaruhnya dalam perkembangan dan peningkatan mutu pendidikan, ketrampilan maupun keahlian.
 - 2) Kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang masih belum merata dan rendah sehingga kesempatan memperoleh pendidikan belumlah setara diantara masyarakat Daerah Kabupaten Banjarnegara sendiri.
 - 3) Menipisnya nilai-nilai budaya pada generasi muda, seperti penggunaan bahasa Jawa yang semakin luntur serta unggah-ungguh terhadap kaum yang lebih tua akibat pola asuh anak-anak yang terlalu berkiblat pada nilai-nilai praktis sehingga anak-anak kurang mengenal tata karma, budi pekerti dan sopan-santun.
 - 4) Budaya persaingan positif bagi sebagian masyarakat masih rendah.

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman terhadap kondisi internal dan eksternal Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga Kabupaten Banjarnegara dapat dijabarkan sebagai berikut :

	Kekuatan (Strength/S)	Kelemahan (weaknesses/W)
Peluang (opportunities/O)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Melakukan optimalisasi di semua bidang pendidikan ➤ Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pendidikan ➤ Meningkatkan pelayanan pendidikan, ketrampilan & keahlian bagi masyarakat ➤ Meningkatkan kualitas & karakter pendidikan berdasar budaya & kearifan lokal. ➤ Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Meningkatkan efisiensi di semua tingkatan jenjang pendidikan, lembaga ketrampilan & keahlian. ➤ Meningkatkan manajemen pendidikan ➤ Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi untuk pendidikan ➤ Meningkatkan nilai-nilai budaya sebagai kearifan dan keunggulan lokal pendidikan. ➤ Meningkatkan pemanfaatan olah raga yang terjangkau dan dapat dilakukan sebagai bentuk pendukung pelaksanaan kinerja masyarakat.
Ancaman (Threat/T)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Menjaga kualitas hasil pembelajaran ➤ Mengantisipasi merebaknya penyakit masyarakat ➤ Mengantisipasi melemahnya minat melanjutkan pendidikan dengan menyediakan lebih banyak lembaga pelatihan ketrampilan & keahlian. ➤ Mengembalikan tujuan awal lembaga pendidikan bukanlah sebagai profit oriented semata 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Mengoptimalkan SDM melalui pemanfaatan dan pengoptimalan materi pendidikan. ➤ Menumbuhkan kesadaran bahwa pendidikan adalah hal pokok yang mendasar dalam membuka wawasan dan kesempatan dalam masyarakat dengan didukung oleh ketrampilan & keahlian yang dapat dilatih & dimiliki. ➤ Menjalin kerjasama dan hubungan koordinasi dengan lembaga pendidikan secara beriringan sehingga tetap dapat memiliki control agar lembaga tidak hanya bersifat

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Visi dan Misi Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

A. Landasan Filosofis

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan landasan filosofis serta berbagai prinsip dasar dalam pembangunan pendidikan. Berdasarkan landasan filosofis tersebut, sistem pendidikan nasional menempatkan peserta didik sebagai makhluk yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan segala fitrahnya dengan tugas memimpin kehidupan yang berharkat dan bermartabat serta menjadi manusia yang bermoral, berbudi luhur, dan berakhlak mulia.

Pendidikan merupakan upaya memberdayakan peserta didik untuk berkembang menjadi manusia Indonesia seutuhnya, yaitu yang menjunjung tinggi dan memegang dengan teguh norma dan nilai sebagai berikut:

1. **Norma agama dan kemanusiaan** untuk menjalani kehidupan sehari-hari, baik sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, makhluk individu, maupun makhluk sosial;
2. **Norma persatuan bangsa** untuk membentuk karakter bangsa dalam rangka memelihara keutuhan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);
3. **Norma kerakyatan dan demokrasi** untuk membentuk manusia yang memahami dan menerapkan prinsip-prinsip kerakyatan dan demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan
4. **Nilai-nilai keadilan sosial** untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang merata dan bermutu bagi seluruh bangsa serta menjamin penghapusan segala bentuk diskriminasi dan gender serta

terlaksananya pendidikan untuk semua dalam rangka mewujudkan masyarakat berkeadilan sosial.

B. Visi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dari suatu organisasi/instansi pemerintah. Untuk mengantisipasi tantangan ke masa depan menuju kondisi masyarakat Kabupaten Banjarnegara yang madani. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Banjarnegara telah mengambil berbagai langkah sebagai upaya untuk memaju kembangkan pendidikan guna meningkatkan kecerdasan, kreativitas, disiplin, daya juang, dan berwawasan kebangsaan.

Untuk hal tersebut Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Banjarnegara menentukan visi sebagai berikut:

Terwujudnya Pembangunan Pendidikan yang Cerdas, Bermutu dan Berdaya Saing

Beberapa pengertian yang perlu dipahami terkait dengan visi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pendidikan yang cerdas

Merupakan sesuatu kondisi yang mempunyai kualitas/bermutu, yaitu mempunyai nilai lebih yang berkaitan dengan bidang keilmuan, kecerdasan, kecakapan, kreatif, dan kemandirian, dengan indikator:

- a. Meningkatnya nilai hasil evaluasi akademis siswa mencakup ranah kognitif, afektif, dan psikomotor
- b. Meningkatnya sarana dan prasarana serta kegiatan belajar mengajar

2. Pendidikan yang bermutu

Merupakan sikap mental dan tingkah laku yang didasari keyakinan dan kepatuhan kepada Tuhan Yang maha Esa, dengan indikator:

- a. Meningkatnya profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan

- b. Meningkatnya ketaatan melaksanakan ibadah, dalam arti melaksanakan perintah dan menjauhi larangan yang ditentukan oleh ajaran agama
 - c. Meningkatnya budi pekerti yang luhur, sehingga terbentuk akhlak mulia (akhlakul karim)
3. Berdaya saing
- Merupakan suatu kondisi dimana produk proses pendidikan mampu beradaptasi dan diterima di berbagai kalangan, dengan indikator:
- a. Meningkatnya angka kelulusan
 - b. Meningkatnya angka melanjutkan

C. Misi

Misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh organisasi/ instansi pemerintah agar tujuan organisasi dapat tercapai dan berhasil dengan baik.

Dengan adanya misi, diharapkan seluruh pegawai dan pihak-pihak yang berkepentingan dapat memahami peran dan program-program Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Banjarnegara serta hasil yang dapat diperoleh di masa yang akan datang, sehingga akan ikut serta mendukung pada pelaksanaan program/kegagalannya.

Mendasarkan pada hal tersebut, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Banjarnegara menetapkan misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan profesionalisme para penyelenggara di bidang pendidikan
2. Meningkatkan sarana dan prasarana yang lebih memadai di bidang pendidikan
3. Meningkatkan kerjasama pemangku kepentingan (*Stake holder*) dalam memajukan pendidikan
4. Meningkatkan peran serta masyarakat di bidang pendidikan
5. Meningkatkan kesejahteraan para penyelenggara pendidikan

4.2. Tujuan Sasaran

A. Tujuan

Merupakan penjabaran atau implementasi dari misi dan merupakan hasil akhir yang ingin dicapai di masa mendatang, dapat bersifat kualitatif atau kuantitatif serta diupayakan berfokus kepada *outcome*. Untuk menetapkan tujuan perlu diperhatikan nilai-nilai, lingkungan, dan faktor-faktor kritis yang dimungkinkan dapat mempengaruhi keberhasilan. Tujuan yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Bidang penyelenggaraan TK/SD
 - a. Penuntasan Wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun
 - b. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana TK/SD
 - c. Peningkatan mutu dan profesionalisme guru
 - d. Terwujudnya kelancaran proses belajar mengajar yang optimal
2. Bidang penyelenggaraan Sekolah Menengah
 - a. Penuntasan Wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun
 - b. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana SMP dan SM
 - c. Peningkatan mutu dan profesionalisme guru
 - d. Terwujudnya kelancaran proses belajar mengajar yang optimal
3. Bidang penyelenggaraan PAUD Dikmaspora
 - a. Penuntasan Wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun
 - b. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana Pendidikan Luar Sekolah
 - c. Pembinaan Generasi Muda, Olah Raga dan Kebudayaan
 - d. Peningkatan mutu dan profesionalisme Penilik PLS dan Tutor Kejar Paket A, B, dan C sebagai upaya peningkatan SDM
4. Bidang penyelenggaraan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan
 - a. Pemenuhan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan
 - b. Penetapan Angka Kredit bagi tenaga fungsional
 - c. Peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan

B. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, ditetapkan dengan menggunakan ukuran kuantitatif sehingga pencapaiannya dapat diukur dengan jelas, terfokus pada tindakan dan hasil, yaitu kegiatan yang

bersifat spesifik, terinci, dapat diukur, dan dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu.

Sasaran yang diinginkan dalam pembangunan pendidikan di Kabupaten Banjarnegara adalah:

1. Penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun
2. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai
3. Pemenuhan tenaga pendidik dan kependidikan yang cukup
4. Peningkatan kualitas tenaga pendidikan
5. Pengembangan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) pada semua tingkatan
6. Pemberantasan buta aksara melalui peningkatan program Pendidikan Luar Sekolah (PLS)

BAB V

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, PROGRAM DAN INDIKATOR

Berdasarkan visi, misi serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan strategi, arah kebijakan, dan program. Selain itu, untuk mengukur capaian kinerja maka dirumuskan pula indikator sebagai tolak ukur kinerja

A. Strategi

1. Peningkatan mutu pendidikan untuk mencapai standar nasional dan internasional.
2. Peningkatan kualitas dan profesionalisme pendidik, tenaga kependidikan dan lembaga pendidikan yang mampu meningkatkan wawasan, keterbukaan dan toleransi.
3. Peningkatan peran serta lembaga pendidikan dan masyarakat dalam pemasyarakatan dan peningkatan prestasi olahraga.
4. Pembangunan pedesaan.
5. Peningkatan dan pengembangan infrastruktur.
6. Peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana fasilitas pelayanan publik.

B. Arah Kebijakan

1. Meningkatkan standar manajemen mutu lembaga pendidikan dan kualitas tenaga pendidik secara merata.
2. Menuntaskan wajib belajar 9 tahun.
3. Meningkatkan standar mutu kurikulum pendidikan yang terkini, berkualitas, beriman, dan bertaqwa.
4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga pendidik bersertifikasi.
5. Menyelenggarakan dan meningkatkan pembelajaran berbasis iman dan taqwa.

6. Meningkatkan kapasitas lembaga pendidikan dalam mengembangkan proses belajar mengajar berbasis iman dan taqwa.
7. Mendorong kegiatan olahraga andalan daerah yang disertai peningkatan kualitas dan kuantitas sarana olahraga serta peningkatan peran pemuda dalam pembangunan.
8. Meningkatkan hubungan kerjasama yang saling menguntungkan dengan semua pihak.
9. Memfasilitasi model pelatihan ketrampilan dan keahlian kepada pemuda.
10. Membangun sistem informasi yang mudah diakses oleh stakeholder dan masyarakat secara luas.
11. Meningkatkan sarana dan prasarana daerah untuk meningkatkan pelayanan publik secara berkesinambungan.

C. Program

1. Pendidikan
 - a. Program Pendidikan Anak Usia Dini
 - b. Program Pendidikan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
 - c. Program Pendidikan Menengah
 - d. Program Pendidikan Non Formal
 - e. Program Pendidikan Luar Biasa
 - f. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
 - g. Program Manajemen Layanan Pendidikan
2. Pemuda dan Olah Raga
 - a. Program Peningkatan Peran serta Pemuda Dalam Pembangunan
 - b. Program Pembinaan Keolahragaan

D. Indikator Kinerja

1. Indikator kinerja pendidikan

Indikator kinerja pendidikan tahun 2012 – 2017 ditinjau dari aspek kesejahteraan di Kabupaten Banjarnegara secara rinci disajikan pada Tabel 5.1. Sedangkan Indikator kinerja pendidikan tahun 2012 – 2017 ditinjau dari aspek pelayanan umum di Kabupaten Banjarnegara secara rinci disajikan pada Tabel 5.2. di bawah ini.

Tabel 5.1.

Indikator Kinerja Pendidikan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012-2016
Ditinjau Aspek Kesejahteraan Masyarakat

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal		Tahun					Kondisi Kinerja Akhir
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
1	Angka melek huruf	99,96	99,96	99,97	99,98	99,98	99,99	100	100
2	Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A	103,95	97,31	97,85	98,38	98,92	99,46	100	100
3	Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Paket B	95,81	80,83	83,67	86,50	89,33	92,17	95,00	95,00
4	Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/MA/Paket C	51,06	52,47	53,24	54,01	54,78	55,54	56,31	56,31
5	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	98,05	96,93	97,47	98,01	98,55	99,08	99,62	99,62
6	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	95,81	78,76	81,59	84,43	87,26	90,09	92,93	92,93
7	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	45,91	45,14	45,91	46,68	47,45	48,22	48,99	48,99

Tabel 5.2.

Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012-2016
Aspek Pelayanan Umum

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal		Tahun					Kondisi Kinerja Akhir
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
	Fokus Layanan Urusan Wajib								
I	Pendidikan								
1	Pendidikan dasar:								
a	Angka partisipasi sekolah:								
	Angka partisipasi sekolah usia 7-12 tahun	99,60	96,95	97,49	98,03	98,57	99,11	99,65	99,65

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal		Tahun					Kondisi Kinerja Akhir
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
	Angka partisipasi sekolah usia 13-15 tahun	91,54	80,57	83,4	86,23	89,06	91,89	94,72	94,72
b	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah	67,56	63,36	67,56	67,56	67,56	67,56	67,56	67,56
c	Rasio guru/murid SD/MI	1:15	1:15	1:16	1:17	1:18	1:19	1:20	1:20
d	Rasio guru/murid SMP/MTs	1:17	1:15	1:17	1:18	1:19	1:20	1:21	1:21
2	Pendidikan menengah								
a	Angka partisipasi sekolah 16-18 tahun	47,13	44,66	45,43	46,20	46,97	47,74	48,51	48,51
b	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah	9,75	10,24	10,44	10,64	10,84	11,04	11,24	11,24
c	Rasio guru terhadap murid	1:16	1:16	1:17	1:18	1:19	1:20	1:21	1:21
3	Fasilitas Pendidikan:								
a	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	66,50	66,71	76,50	81,50	86,50	91,50	96,50	96,50
b	Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	79,70	80,75	85,70	88,70	91,70	94,70	97,70	97,70
c	Sekolah pendidikan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik	90,17	91,56	92,17	93,17	94,17	95,17	96,17	96,17
4	Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 (tiga) km untuk SD / MI dan 6 (enam) km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman didaerah terpencil						100	100	100
5	Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 (tiga puluh dua) orang dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 (tiga puluh enam) orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis.						100	100	100
6	Disetiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 (tiga puluh enam) peserta didik dan minimal satu set						100	100	100

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal		Tahun					Kondisi Kinerja Akhir
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
	peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik								
7	Disetiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia satu ruang guru yang dilengkapi kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya dan disetiap SMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru.						100	100	100
8	Disetiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 (tiga puluh dua) peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan.						100	100	100
9	Disetiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran						100	100	100
10	Kunjungan pengawas kesatuan pendidikan dilakukan minimal satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 (tiga) jam untuk melakukan supervise dan pembinaan						100	100	100
11	Setiap SD/MI menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA dan IPS dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik.						100	100	100
12	Setiap SMP/MTs menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik.						100	100	100
13	Setiap SD/MI menyediakan satu set						100	100	100

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal		Tahun					Kondisi Kinerja Akhir
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
	peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (globe), contoh peralatan optic, kit IPA untuk eksperimen dasar, dan poster/carta.								
14	Setiap SD/MI memiliki minimal 100 (seratus) judul buku pengayaan dan 10 (sepuluh) judul buku referensi, dan setiap SMP/MTS memiliki 200 (dua ratus) judul buku pengayaan dan 20 (dua puluh) judul buku referensi.						100	100	100
15	Disetiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikasi pendidik.						100	100	100
16	Disetiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% (tujuh puluh per seratus) dan separuh diantaranya 35% (tiga puluh lima perseratus) dari keseluruhan guru telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% (empat puluh per seratus) dan 20% (dua puluh perseratus)						100	100	100
17	Disetiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing 1 (satu) orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris						100	100	100
18	Disetiap SD/MI semua kepala SD/MI berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik						100	100	100
19	Disetiap SMP/MTs semua kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat						100	100	100

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal		Tahun					Kondisi Kinerja Akhir
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
	pendidik								
20	Semua pengawas sekolah dan madrasah memiliki kualitas akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik.						100	100	100
21	Setiap guru tetap bekerja 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan.						100	100	100
22	Setiap guru menerapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya.						100	100	100
23	Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik.						100	100	100
24	Kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru 4 (empat) kali dalam setiap semester.						100	100	100
25	setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada kepala sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar peserta didik						100	100	100
26	Kepala Sekolah atau madrasah menyampaikan laporan hasil Ulangan Akhir Semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) serta Ujian Akhir (US/UN) kepada orang tua peserta didik dan						100	100	100

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal		Tahun					Kondisi Kinerja Akhir
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
	menyampaikan rekapitulasi kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga atau Kantor Kementerian Agama								
27	Angka Rata-rata UN								
a	Angka rata-rata UN SD/MI	7,21	7,33	7,50	7,65	7,75	7,80	7,83	7,83
b	Angka rata-rata UN SMP/MTs	6,66	6,99	7,04	7,20	7,35	7,45	7,50	7,50
c	Angka rata-rata UN SMA/MA	7,87	8,34	8,42	8,48	8,52	8,56	8,58	8,58
d	Angka rata-rata UN SMK	7,42	8,07	8,13	8,18	8,22	8,25	8,27	8,27
28	Satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran 34 (tiga puluh empat) minggu per tahun dengan kegiatan tatap muka sebagai berikut :						100	100	100
a	Kelas I-II : 18 (delapan belas) jam per minggu;						100	100	100
b	Kelas III :24 (dua puluh empat) jam per minggu;						100	100	100
c	Kelas IV-VI : 27 (dua puluh tujuh) per minggu;						100	100	100
d	Kelas VII-IX: 27 (dua puluh tujuh) per minggu;						100	100	100
29	Satuan pendidikan menerapkan KTSP sesuai ketentuan yang berlaku.						100	100	100
30	setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)						100	100	100
31	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD):						100	100	100
32	APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	69,05	60,68	69,15	69,20	69,25	69,30	69,35	69,35
33	Angka Putus Sekolah:								
a	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,27	0,29	0,23	0,21	0,19	0,17	0,15	0,15
b	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0,76	0,99	0,66	0,61	0,56	0,51	0,46	0,46
c	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	0,86	1,19	0,76	0,71	0,66	0,61	0,56	0,56
34	Angka Kelulusan:								
a	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	97,65	99,85	99,90	99,95	99,96	99,97	99,98	99,98
b	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	99,19	96,44	97,56	98,12	98,68	99,24	99,80	99,80
c	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	97,27	99,93	99,94	99,95	99,96	99,97	99,98	99,98

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal		Tahun					Kondisi Kinerja Akhir
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
35	Angka Melanjutkan								
a	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	89,87	87,98	89,97	91,97	93,97	95,97	97,97	97,97
b	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	67,19	69,06	70,06	71,06	72,06	73,06	74,06	74,06
36	Kualifikasi Guru								
a	Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	26,71	49,63	54,63	59,63	64,63	69,63	74,63	74,63
b	Guru SMP yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	89,10	90,55	92,10	93,60	95,10	96,60	98,10	98,10
c	Guru SMA yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	95,78	96,64	96,78	97,28	97,78	98,28	98,78	98,78
d	Guru SMK yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	89,89	95,60	96,60	97,10	97,60	98,60	99,00	99,00

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal		Tahun					Kondisi Kinerja Akhir
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
IV	Seni Budaya dan Olahraga								
1	Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk	0,069	0,069	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070
2	Gedung kesenian per 10.000 penduduk	0	0	0	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001
3	Pemuda dan Olahraga								
a	Jumlah klub olahraga per 10.000 jumlah penduduk	0,0016	-	0,0016	0,0016	0,0016	0,0016	0,0016	0,0016
b	Jumlah gedung olahraga per 10.000 jumlah penduduk	0,0003	-	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003

2. Indikator kinerja pendidikan

Indikator kinerja Kepemudaan dan olah raga tahun 2012 – 2017 di Kabupaten Banjarnegara disajikan pada Tabel 5.3 di bawah ini.

Tabel 5.3.
Indikator Kinerja Kepemudaan dan Olah raga di Kabupaten Banjarnegara
Tahun 2012-2016

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal		Tahun					Kondisi Kinerja Akhir
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
1	Jumlah organisasi pemuda	24	24	24	24	24	24	24	24
2	Jumlah organisasi olahraga	27	27	27	27	27	27	27	27
3	Jumlah kegiatan kepemudaan	7	7	7	7	7	7	7	7
4	Jumlah kegiatan olahraga	5	5	5	5	5	5	5	5
5	Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)	4	4	4	4	4	4	4	4
6	Lapangan olahraga	46	46	46	46	46	46	46	46
7	Jumlah klub olahraga per 10.000 jumlah penduduk	0,0016	-	0,0016	0,0016	0,0016	0,0016	0,0016	0,0016
8	Jumlah gedung olahraga per 10.000 jumlah penduduk	0,0003	-	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003

BAB VI

P E N U T U P

Rencana strategis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara Tahun 2013 – 2017 merupakan penjabaran dari visi, misi program Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Kabupaten Banjarnegara untuk 5 (lima) tahun mendatang dan mengacu pada RPJMD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 – 2016 sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) Kabupaten Banjarnegara dan setiap tahunnya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara.

Untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan bidang pendidikan, pemuda dan olahraga, diperlukan kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Renstra Tahun 2013 – 2017 diarahkan dan dikendalikan oleh Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara.
2. Seluruh Sekretariat dan Bidang Teknis/Fungsional yang ada di lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara agar melaksanakan program-program dalam Renstra Tahun 2013 – 2017 dengan sebaik-baiknya.
3. Setiap Sekretariat dan Bidang Teknis/Fungsional Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara sesuai dengan tugas dan fungsi bidang masing-masing berkewajiban untuk menyusun program kegiatan yang mengandung visi, misi, tujuan dan strategi yang ada dalam Renstra Tahun 2013 – 2017.
4. Agar Renstra Tahun 2013 – 2017 dapat dilaksanakan dan memberikan hasil yang diharapkan, maka setiap bidang teknis/fungsional, sekretariat dan UPTD perlu mengupayakan penguatan peran stakeholder dalam mendukung pelaksanaan Renstra Tahun 2013 – 2017 ini, di samping itu ditempuh melalui proses sosialisasi, baik kepada seluruh komponen pegawai yang ada di lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara, instansi terkait maupun masyarakat luas.

5. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra Tahun 2013 – 2017, dipandang perlu untuk melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra tahun 2013 – 2017, sebagai berikut :
 - a. Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan bidang pendidikan, pemuda dan olahraga dilakukan oleh masing-masing kepala bidang teknis dan UPTD.
 - b. Kepala Dinas melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana kerja SKPD periode sebelumnya.
 - c. Hasil evaluasi sebagaimana tersebut diatas menjadi bahan bagi penyusunan rencana kerja untuk periode berikutnya.

Apabila dalam periode pelaksanaan Renstra Tahun 2013 – 2017 dihadapkan pada hal-hal diluar kendali Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara, maka konsepsi strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan agar dapat ditinjau melalui konsultasi dengan Bappeda untuk mendapatkan pertimbangan lebih lanjut dalam proses pelaksanaannya.

Angka melek huruf direpresentasikan oleh persentase jumlah penduduk usia di atas 15 tahun sampai usia 44 tahun yang melek huruf. Angka melek huruf di Kabupaten Banjarnegara dari tahun 2007 hingga 2011 menunjukkan tren yang meningkat dari 97,55% pada tahun 2007 menjadi 99,96% pada tahun 2011, melebihi target provinsi sebesar 99,20% dan nasional sebesar 95%. Pada tahun 2011 masih terdapat 0,80% atau 281 orang penduduk yang buta aksara.

Angka rata-rata lama sekolah (*years of schooling*) adalah sebuah angka yang menunjukkan lamanya bersekolah seseorang dari masuk sekolah dasar sampai dengan Tingkat Pendidikan Terakhir (TPT). Angka ini diperoleh dengan menghitung rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Banjarnegara mengalami peningkatan tiap tahunnya dari 5,98 tahun pada 2007, menjadi sebesar 6,33 tahun pada 2010. Angka rata-rata lama belajar merupakan angka rata-rata lama belajar siswa pada suatu jenjang pendidikan. Angka rata-rata lama belajar untuk jenjang SD/MI masih perlu diperbaiki, dimana waktu penyelesaian jenjang pendidikan SD/MI yang seharusnya diselesaikan dalam waktu 6 tahun, pada tahun 2011 realisasinya diselesaikan dalam waktu 6,36 tahun.

Angka partisipasi kasar adalah persentase siswa yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu dari jumlah penduduk di usia tertentu. APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator sederhana yang menunjukkan daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

Pada jenjang SD/MI, APK mengalami penurunan dari 101,89% pada tahun 2007 menjadi 97,31% pada tahun 2011, belum mencapai target provinsi sebesar 110,00% dan nasional 117,20%. APK SMP/MTs mengalami penurunan dari 92,47% pada tahun 2007 menjadi 80,83% pada tahun 2011, belum mencapai target provinsi sebesar 98,00% dan nasional 99,30%. Pada jenjang SMA/MA/SMK terjadi peningkatan dari 44,49% pada tahun 2007 menjadi 52,47% pada tahun 2011, namun juga belum mencapai target provinsi sebesar 70,00% dan nasional 73,00%. Penyebab tidak tercapainya target APK diantaranya adalah kurangnya pemerataan akses pendidikan khususnya pada jenjang SMA/MA/SMK dimana pendirian sekolah masih terpusat pada beberapa

kecamatan saja. Dalam rangka peningkatan APK jenjang SMP/MTs salah satunya adalah dengan pendirian SMP Satu Atap, sedangkan pada jenjang SMA/MA/SMK dengan pendirian Unit Sekolah Baru (USB) di beberapa kecamatan.

Angka partisipasi murni adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. APM menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah tertentu di tingkat pendidikan tertentu. APM merupakan indikator daya serap pendidikan berdasarkan usia standar di setiap jenjang pendidikan. Angka Partisipasi Murni (APM) jenjang SD/MI mengalami peningkatan dari 93,14% pada tahun 2007 menjadi 96,93% pada tahun 2011, belum mencapai target provinsi sebesar 98,00%, tetapi sudah melampaui target nasional sebesar 95,20%. Pada jenjang SMP/MTs menurun dari 83,46% pada tahun 2007 menjadi 78,76% pada tahun 2011, tetapi sudah melampaui target nasional sebesar 74,00%. Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK mengalami peningkatan dari 40,21% pada tahun 2007 menjadi 45,14% pada tahun 2011.

Lampiran Matriks implementasi Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan dalam pemecahan masalah

Visi	Misi	Tujuan dan Sasaran	Strategi dan arah kebijakan	Masalah
<p><i>“Terwujudnya Pembangunan Pendidikan yang Cerdas, Bermutu dan Berdaya Saing”</i></p> <p>Pendidikan yang cerdas</p> <p>Merupakan sesuatu kondisi yang mempunyai kualitas/bermutu, yaitu mempunyai nilai lebih yang berkaitan dengan bidang keilmuan, kecerdasan, kecakapan, kreatif, dan</p>	<p>1. Meningkatkan profesionalisme para penyelenggara di bidang pendidikan</p> <p>2. Meningkatkan sarana dan prasarana yang lebih memadai di bidang pendidikan</p> <p>3. Meningkatkan kerjasama pemangku kepentingan (<i>Stake holder</i>) dalam memajukan pendidikan</p> <p>4. Meningkatkan peran serta masyarakat di bidang pendidikan</p>	<p>1. Bidang penyelenggaraan TK/SD</p> <p>a. Penuntasan Wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun</p> <p>b. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana TK/SD</p> <p>c. Peningkatan mutu dan profesionalisme guru</p> <p>d. Terwujudnya kelancaran proses belajar mengajar</p>	<p>Strategi Bidang Pendidikan</p> <p>1. Peningkatan mutu pendidikan untuk mencapai standar nasional dan internasional.</p> <p>2. Peningkatan kualitas dan profesionalisme pendidik, tenaga kependidikan dan lembaga pendidikan yang mampu meningkatkan wawasan, keterbukaan dan toleransi.</p> <p>3. Peningkatan peran serta lembaga pendidikan dan masyarakat dalam pemasyarakatan dan</p>	<p>Bidang pendidikan</p> <p>a) Kondisi gedung sekolah dan rumah dinas guru/penjaga maiz banyak yang rusak,</p> <p>b) Masih kurangnya sarana prasarana peningkatan mutu sekolah: gedung perpustakaan, gedung laboratorium, peralatan laboratorium/ praktikum, alat peraga dan sarana penunjang yang lain,</p> <p>c) Kondisi meubelair di sekolah banyak yang</p>

Visi	Misi	Tujuan dan Sasaran	Strategi dan arah kebijakan	Masalah
<p>kemandirian, dengan indikator :</p> <p>a. Meningkatnya nilai hasil evaluasi akademis siswa mencakup ranah kognitif, afektif, dan psikomotor</p> <p>b. Meningkatnya sarana dan prasarana serta kegiatan belajar mengajar</p> <p>Pendidikan yang Bermutu</p> <p>Merupakan sikap mental dan tingkah laku yang didasari keyakinan dan kepatuhan kepada</p>	<p>5. Meningkatkan kesejahteraan para penyelenggara pendidikan</p>	<p>yang optimal</p> <p>2. Bidang penyelenggaraan Sekolah Menengah</p> <p>a. Penuntasan Wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun</p> <p>b. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana SMP dan SM</p> <p>c. Peningkatan mutu dan profesionalisme guru</p> <p>d. Terwujudnya kelancaran proses belajar mengajar</p>	<p>peningkatan prestasi olahraga.</p> <p>4. Pembangunan pedesaan.</p> <p>Arah Kebijakan Bidang Pendidikan</p> <p>1. Meningkatkan standar manajemen mutu lembaga pendidikan dan kualitas tenaga pendidik secara merata.</p> <p>2. Menuntaskan wajib belajar 9 tahun.</p> <p>3. Meningkatkan standar mutu kurikulum pendidikan yang terkini, berkualitas, beriman, dan bertaqwa.</p>	<p>rusak,</p> <p>d) Terbatasnya anggaran pembangunan gedung</p> <p>2) Penyelenggaraan pendidikan</p> <p>a) Masih adanya anak-anak usia sekolah yang Belem sekolah atau tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi terutama SMP dan SMA/SMK</p> <p>b) Masih banyak sekolah penerima dana Bantuan Operasional Siswa (BOS) yang belem atau kurang memahami tentang pengelolaan dana BOS sesuai dengan</p>

Visi	Misi	Tujuan dan Sasaran	Strategi dan arah kebijakan	Masalah
<p>Tuhan Yang maha Esa, dengan indikator :</p> <p>a. Meningkatnya profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan</p> <p>b. Meningkatnya ketaatan melaksanakan ibadah, dalam arti melaksanakan perintah dan menjauhi larangan yang ditentukan oleh ajaran agama</p> <p>c. Meningkatnya budi pekerti yang luhur, sehingga terbentuk akhlak mulia (akhlakul karim)</p> <p>Pendidikan yang</p>		<p>yang optimal</p> <p>3. Bidang penyelenggaraan PAUD Dikmaspora</p> <p>a. Penuntasan Wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun</p> <p>b. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana Pendidikan Luar Sekolah</p> <p>c. Pembinaan Generasi Muda, Olah Raga dan Kebudayaan</p> <p>d. Peningkatan mutu dan</p>	<p>4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga pendidik bersertifikasi.</p> <p>5. Menyelenggarakan dan meningkatkan pembelajaran berbasis iman dan taqwa.</p> <p>6. Meningkatkan kapasitas lembaga pendidikan dalam mengembangkan proses belajar mengajar berbasis iman dan taqwa.</p> <p>Program Bidang Pendidikan</p> <p>a. Program Pendidikan Anak Usia Dini</p> <p>b. Program Pendidikan Wajib Belajar Pendidikan</p>	<p>pedoman yang berlaku</p> <p>c) Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) di satuan pendidikan Belum optimal sebagaimana yang diharapkan</p> <p>d) Tim Pengembang Kurikulum Kabupaten (TPK) yang terbentuk tidak berjalan sesuai tugas yang tertuang dalam SK Pembentukan Tim Pengembang Kurikulum Kabupaten</p> <p>e) Tidak semua siswa miskin menerima Beasiswa Siswa Miskin (BSM) karena</p>

Visi	Misi	Tujuan dan Sasaran	Strategi dan arah kebijakan	Masalah
<p>Berdaya saing</p> <p>Merupakan suatu kondisi dimana produk proses pendidikan mampu beradaptasi dan diterima di berbagai kalangan, dengan indikator :</p> <p>a. Meningkatnya angka kelulusan</p> <p>b. Meningkatnya angka melanjutkan sekolah</p>		<p>profesionalisme Penilik PLS dan Tutor Kejar Paket A, B, dan C sebagai upaya peningkatan SDM</p> <p>4. Bidang penyelenggaraan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan</p> <p>a. Pemenuhan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan</p> <p>b. Penetapan Angka Kredit bagi tenaga fungsional</p> <p>c. Peningkatan</p>	<p>Dasar Sembilan Tahun</p> <p>c. Program Pendidikan Menengah</p> <p>d. Program Pendidikan Non Formal</p> <p>e. Program Pendidikan Luar Biasa</p> <p>f. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan</p> <p>g. Program Manajemen Layanan Pendidikan</p>	<p>terbatasnya kuota</p> <p>3) Pendidikan dan tenaga kependidikan</p> <p>a) Proses pembelajaran sebagai wujud pengembangan kurikulum kurang optimal sebagai akibat distribusi guru mata pelajaran di sebagian besar satuan pendidikan kurang proporsional dengan kebutuhan yang semestinya</p> <p>b) Masih banyak guru yang belum memenuhi standar kualifikasi minimal, terutama SD/MI</p>

Visi	Misi	Tujuan dan Sasaran	Strategi dan arah kebijakan	Masalah
		<p>kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan</p> <p>Sasaran</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun 2. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai 3. Pemenuhan tenaga pendidik dan kependidikan yang cukup 4. Peningkatan 	<p></p> <hr/> <p><i>Strategi Bidang Pemuda dan Olah Raga</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan dan pengembangan infrastruktur. 2. Peningkatan dan 	<p>c) Masih sedikitnya guru yang lupus sertifikasi berakibat pada kesenjangan kesejahteraan guru dan kinerja guru</p> <p>d) Tidak adanya tenaga administrasi di SD/MI berakibat guru yang disibukkan dengan kegiatan administrasi keuangan dana BOS atau bantuan lainnya</p> <hr/> <p><i>Bidang Pemuda dan Olah Raga</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Belum berfungsinya beberapa kepengurusan cabang olah raga sehingga menghambat program pembinaan dan

Visi	Misi	Tujuan dan Sasaran	Strategi dan arah kebijakan	Masalah
		<p>kualitas tenaga pendidikan</p> <p>5. Pengembangan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) pada semua tingkatan</p> <p>6. Pemberantasan buta aksara melalui peningkatan program Pendidikan Luar Sekolah (PLS)</p>	<p>pengembangan sarana dan prasarana fasilitas pelayanan publik.</p> <p><i>Arah Kebijakan Pemuda dan Olah Raga</i></p> <p>1. Mendorong kegiatan olahraga andalan daerah yang disertai peningkatan kualitas dan kuantitas sarana olahraga serta peningkatan peran pemuda dalam pembangunan.</p> <p>2. Meningkatkan hubungan kerjasama yang saling menguntungkan dengan semua pihak.</p> <p>3. Memfasilitasi model pelatihan ketrampilan dan</p>	<p>pembibitan atlet yang potensial</p> <p>2) Minimnya sarana dan prasarana olah raga dengan klasifikasi estándar baku baik secara nasional maupun internasional</p> <p>3) Kurangnya pembinaan generasi muda pada hal-hal yang mengarah kepada kegiatan bekal masa depan agar mereka dapat hidup mandiri</p>

Visi	Misi	Tujuan dan Sasaran	Strategi dan arah kebijakan	Masalah
			<p>keahlian kepada pemuda.</p> <p>4. Membangun sistem informasi yang mudah diakses oleh stakeholder dan masyarakat secara luas.</p> <p>5. Meningkatkan sarana dan prasarana daerah untuk meningkatkan pelayanan publik secara berkesinambungan.</p> <p><i>Program Pemuda dan Olah Raga</i></p> <p>1. Program Peningkatan Peran serta Pemuda Dalam Pembangunan</p> <p>2. Program Pembinaan</p>	

Visi	Misi	Tujuan dan Sasaran	Strategi dan arah kebijakan	Masalah
			Keolahragaan	
			<p>Strategi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fokus penguatan peran dan fungsi kelembagaan Dinas Pendidikan, Pemuda dan olah Raga dalam lingkup masyarakat 2. Melakukan integrasi peran dan wewenang Dinas Pendidikan, Pemuda dan olah Raga dengan dinas dan instansi terkait 3. Peningkatan ragam kegiatan dan program yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan <p>Arah Kebijakan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan standar 	<p>Kelembagaan</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Keterbatasan wewenang dan urusan dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan olah Raga yang secara umum masih berperan sebagai fasilitator maupun regulator b. Pengkoordinasian serta pensinkronisian program kegiatan Dinas Dinas Pendidikan, Pemuda dan olah Raga yang belum optimal c. Pemanfaatan sistem teknologi informasi yang masih belum optimal di

Visi	Misi	Tujuan dan Sasaran	Strategi dan arah kebijakan	Masalah
			<p>manajemen mutu lembaga pendidikan dan kualitas tenaga pendidik secara merata.</p> <p>2. Meningkatkan kapasitas lembaga pendidikan dalam mengembangkan proses belajar mengajar berbasis iman dan taqwa.</p> <p>Program</p> <p>a. Program pengembangan kepemimpinan lembaga</p> <p>b. Program pelatihan dan pengembangan sistem informasi kelembagaan</p> <p>c. Program peningkatan</p>	<p>bidang pendidikan baik dari segi teknologi peralatan hardware dan software yang digunakan maupun sumber daya manusia</p>

Visi	Misi	Tujuan dan Sasaran	Strategi dan arah kebijakan	Masalah
			layanan kelembagaan d. Progam peningkatan komunikasi dan koordinasi antara dinas dan lembaga.	